

MEDIA MASSA DAN LABELLING TERORISME (Suatu Analisis Terhadap Skenario Agenda Setting Global dan Nasional)

Ema Khotimah**

Abstrak

Karya Tulis ini menggambarkan betapa besar kekuatan media massa dalam melakukan agenda setting, yaitu bagaimana media massa menyajikan suatu peristiwa. Dengan menonjolkan aspek-aspek tertentu dan memberikan suatu bobot tertentu pula pada suatu isu –seperti perbedaan durasi, frekuensi masa tayang- media massa sanggup mempengaruhi khalayak mengenai “what to think about” dan menjadikannya sebagai bahan pembicaraan di masyarakat nasional, regional, maupun internasional.

Ada suatu upaya stigmatisasi secara sistematis yang menggiring khalayak ke arah pemikiran bahwa Islam identik dengan terorisme. Hal ini terus dikembangkan dan diperluas melalui dukungan pemberitaan di media massa yang begitu intensif. Sebagai contoh adalah kasus peledakan bom di Bali. Media massa menampilkannya dengan begitu mengerikan dibandingkan tragedi World Trade Center di New York, Amerika Serikat. Media massa baik nasional maupun internasional adalah faktor yang menentukan mencuatnya agenda tragedi Bali dan telah sukses menggunakan momentum peledakan tersebut untuk membangun agenda setting-nya guna membentuk citra Indonesia dan kelompok Islam sebagai agenda utama politik internasional

Kata Kunci : Media massa, labelling terorisme.

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Begitu Bom meledak di Bali, 12 Oktober 2002 lalu, media massa di seluruh penjuru dunia serempak memberitakan tragedi ini. Di Indonesia,

**Ema Khotimah, Dra., S.Pd., adalah dosen tetap Fakultas Ilmu Komunikasi UNISBA

media massa secara terus-menerus membuat *headline* seputar peledakan tersebut. Bahkan, saking “asyiknya” dengan pemberitaan peledakan bom di Bali ini, media massa Indonesia “lupa”, seolah tidak ada masalah lain yang harus diselesaikan segera oleh bangsa ini dan perhatian masyarakat terserap akan hal ini. Sebuah gambaran betapa besar kekuasaan media massa dalam melakukan *agenda setting*, yang mengagendakan “apa”, yang menjadi bahan pembicaraan di masyarakat nasional, regional maupun internasional.

Disibukkan oleh pemberitaan seputar tragedi Bali, media massa di Indonesia (khususnya media cetak dalam pengamatan penulis), seakan lupa bahwa begitu banyak permasalahan kemanusiaan, politik, ekonomi, dan permasalahan sosial lainnya yang harus juga diagendakan. Terlebih agenda dalam negeri masih memiliki persoalan besar dalam bidang politik dan ekonomi. Bahkan, karena terlalu fokusnya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus di Bali ini, pengamat senior dari Universitas Washington, Prof. Emeritus Daniel S Lev, sampai perlu mengingatkan pemerintah Indonesia agar, “tidak hanyut terbawa arus keinginan negara-negara Barat dalam gerakan antiterorisme. Apalagi harus mengorbankan berbagai prioritas program yang lebih membutuhkan perhatian sesuai dengan kepentingan nasional baik di bidang politik maupun ekonomi” (dalam H.U. Republika, 1 Nopember 2002 : 1).

Aksi intensif pemerintah Indonesia dalam menangani kasus peledakan di Bali, selain karena tekanan politik global, diperburuk oleh situasi sebelumnya dengan adanya pertentangan antara pemerintah dan *simbol keIslaman* (meminjam istilah Deny Hernawan). Bagaimanapun situasi internasional pasca tragedi WTC memang sedang sensitif terhadap gerakan dan kelompok yang dipandang radikal, apalagi “berbau” terorisme. Tidak mengherankan bila kemudiam pemerintah dengan mudah menuduh kelompok Islam garis pimpinan Abu Bakar Ba’asyir sebagai dalang peledakan Bom di Bali. Terlebih, sejak bulan Mei 2002, Abu Bakar Ba’asyir memang telah dituding banyak pihak sebagai dalang terorisme. Hal ini terjadi, karena pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukmin, Ngruki, Sukaharjo ini dikenal lugas dalam berbicara. Selain itu, Ba’asyir telah berulang kali menggugat media massa internasional yang tidak adil dan tidak fair dalam menetapkan siapa teroris dan siapa yang bukan teroris.

Boleh dikatakan, media massa internasional terutama majalah Time sebelum peledakan bom di Bali pun sudah sangat serius “berburu” Ba’asyir. Hal ini diungkapkan oleh Adian Husain dalam salah satu tulisannya di

Republika sepuluh hari menjelang tragedi di Bali.

Sekarangnya selama tahun ini, sudah empat kali (edisi 11 Februari, 1 April, 23 September, dan 30 September) majalah tersebut membuat laporan yang memojokkan Ba'asyir. Pesan dari laporan itu sangat gamblang Abu Bakar Ba'asyir pimpinan PP Al-Mukmin Ngruki, Solo, adalah orang yang berbahaya bagi AS dan karena itu harus ditangkap dan diperlakukan sebagai teroris. Cerita tentang Ba'asyir, Omar Al-Faruq, Agus Dwikarna, Fathurrahman Al-Ghazi, di media Barat, juga pada sebagian media massa Indonesia dibuat menyeramkan. Seolah-olah Ba'asyir, lebih berbahaya bagi bangsa Indonesia ketimbang gerakan organisasi Papua Merdeka atau gerakan separatisme Uskup Belo yang telah sukses melepaskan Timtim dari Indonesia (dalam Republika, 2 Oktober 2002 : 5)

Untuk pemberitaan yang bernuansa sangat memojokkan dan telah mencemarkan nama baiknya ini, Ba'asyir pada tanggal 1 Oktober 2002 melalui kuasa hukumnya Muslim T. Mahendaradatta mengadukan majalah Time serta reporteranya Jason Tedjasukmana ke Markas Besar Polisi Republik Indonesia.

Pasca tragedi Bali, karena tekanan skenario global, Ba'asyir pun dijadikan tersangka kasus peledakan itu, kendati belum terdapat bukti keterlibatannya. Langkah Indonesia dalam menangkap tokoh-tokoh Islam dengan tuduhan terlibat terorisme pun sangat disesalkan oleh berbagai kalangan. Bahkan, penangkapan Ba'asyir di bangsal no. 9 Rumah sakit PKU Muhammadiyah Solo tanggal 28 Oktober 2002, oleh banyak pihak di dalam negeri sebagai, "tindakan yang sangat zalim". Beberapa tokoh Islam, secara terbuka mengecam penangkapan atas Ba'asyir yang terbaring sakit. Ketua Fraksi Partai Bulan Bintang, Ahmad Sumargono diantaranya dan pengamat hukum dari UGM, Prof. Dr. Muchson bahkan menilai bahwa, "prosedur penangkapan Ba'asyir terlalu dipaksakan" (dalam Republik, 29 Oktober 2002 : 1)

Menurut Danny Hermawan Dosen FISIP Universitas Djuanda Bogor, langkah yang diambil pemerintah ini merupakan, "stigmatisasi secara sistematis yang menggiring bahwa Islam adalah identik dengan terorisme kini terus dikembangkan dan diperluas sehingga nuansanya sampai pada tahapan konflik terbuka" (dalam Republika, 11 November 2002 : 1)

Proses stigmatisasi ini juga didukung oleh pemberitaan media massa yang begitu intensif menjadikan kasus peledakan di Bali sebagai berita utama. Terlebih, penggambaran peristiwa peledakan di Bali ini oleh televisi asing di tayangkan begitu mengerikan dibandingkan dengan tayangan ketika terjadi tragedi di Gedung *World Trade Center* (WTC) di New York yang ditabrak pesawat bunuh diri, menelan korban tewas 3.000 orang. Pada kasus bom di Bali yang menelan lebih dari 180 mayat atau serpihan tubuh mayat, yang ditayangkan dengan tubuh-tubuh korban terbakar, darah, serta mayat atau serpihan tubuh mayat yang ditayangkan secara berulang-ulang. Media massa internasional pun seakan memperkokoh opini yang sudah terbentuk bahwa dalang semua perbuatan terorisme ini adalah kelompok islam garis keras, terutama dengan ditangkapnya Ba'asyir.

Dalam perspektif media massa, dampak peristiwa peledakan di Bali telah menyebabkan proses, “globalisasi yang mengarah pada homogenisasi” (Santoso Hamijoyo, 1990 : 31). Homogenisasi dalam hal pandangan (perspektif) yang mengarah pada kesimpulan bahwa pelaku terorisme adalah kelompok radikal islam yang selalu dikaitkan dengan Al-Qaeda. Dalam istilah Alwi Dahlan gejala ini tergolong ke dalam globalisasi emosional yang dimobilisasi oleh media massa.

Betapa tidak? Selama dua bulan berturut-turut, sejak tanggal 12 Oktober 2002, agenda media massa di dominasi oleh seputar peristiwa Bom Bali dan perihal penyelidikan atas pelaku tragedi tersebut dengan berbagai kontroversi dan spekulasi lainnya.

Baru setelah Indonesia dinyatakan kalah oleh Mahkamah Internasional (ICJ) dalam kasus kepulauan Sipadan dan Ligitan, media massa Indonesia seakan disadarkan, bahwa ada agenda-agenda lain yang terabaikan dan itu menyangkut kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Harian Umum Kompas dan Republika sendiri sejak 19 Desember mulai menurunkan posisi berita seputar tragedi Bali tidak di *headline*, setelah kasus jatuhnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke tangan Malaysia.

Sekalipun demikian, tenggat waktu dua bulan sebagai berita utama cukup membuktikan kuatnya *agenda setting* atas peristiwa pemboman di Bali dalam skenario media massa Indonesia.

Sebenarnya, bersamaan dengan peristiwa yang dalam istilah beberapa media massa Indonesia sebagai peristiwa yang “mengguncang” dunia ini, ada agenda besar nasional dalam bidang politik dan ekonomi yang

berkepanjangan, dan tidak terselesaikan. Persoalan-persoalan klasik yang belum terpecahkan akibat krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan dan belum berakhir. Masyarakat saat ini seakan digiring oleh media massa pada permasalahan utama bagaimana mengatasi terorisme.

Persoalannya sekarang adalah apakah sesuatu yang dianggap penting oleh media massa dengan sendirinya menjadi penting untuk seluruh masyarakat sehingga peristiwa agenda setting sedang berlangsung? Dan juga, apakah telah terjadi kekerasan *akskursif* yang dilakukan oleh media massa dalam bentuk *regimentasi* yang telah menyebabkan media massa tidak berfungsi dalam pemerikayaan, malahan terjebak dalam proses menjerumuskan masyarakat pada kondisi pesimisme yang amat mendalam?

1.2 Identifikasi Masalah

Mengingat polemik besarnya peran media massa dalam mempengaruhi opini publik tentang apa yang dianggap penting oleh khalayak. Penulis tertarik melakukan analisis kritis terhadap permasalahan tersebut yang terangkum dalam tiga pertanyaan berikut:

- 1.2.1 Bagaimana kecenderungan *agenda setting* media massa pada pemberitaan tragedi peledakan di Bali?
- 1.2.2 Sejauhmana kontribusi *agenda setting* media massa terhadap proses labelling “teroris”?
- 1.2.3 Apa dampak labelling dan stigma terorisme tersebut terhadap kehidupan sosial masyarakat?

2 Kerangka Pemikiran

2.1 *Agenda Setting* Media Massa

Efek komunikasi massa telah banyak diteliti, baik itu secara laboratoris maupun penelitian yang bersifat lapangan. Salah satunya adalah menggunakan paradigma agenda setting.

Teori agenda setting ini dimulai dengan asumsi bahwa “media massa menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkan secara selektif, ‘gatekeepers’ seperti penyunting, redaksi, bahkan wartawan sendiri menentukan mana yang pantas diberitakan dan yang harus disembunyikan” (Rakhmat, 1994 : 229).

Penelitian khusus mengenai efek media massa dalam paradigma agenda setting ini dilakukan oleh McComb dan Shaw dengan kesimpulan sebagai berikut:

Audiences not only learn about public issues and other matters through the media, they also learn how much importance to attach to an issue or topic from the emphasis the mass media place upon it. For example, in neglecting what candidates are saying during a campaign, the Mass media apparently determine the important issues in other words, the mass media set the agenda of the campaign. This ability to affect cognitive change among individuals is one of the most important aspects of power of mass communication (McCombs and Shaw in McQuall and Windahl, 1984 : 62)

Efek komunikasi yang penting, kemampuan media untuk menstruktur dunia buat kita (dalam Rakhmat, 1994 : 229). Bagaimana media massa menyajikan peristiwa, itulah dinamakan agenda media. Aspek penonjolan tertentu dan pemberian bobot tertentu pada isu-isu tertentu atau perbedaan durasi, frekuensi massa tayang akan menentukan seberapa penting informasi yang disampaikan dibandingkan dengan informasi lainnya.

Pada kondisi ini, media massa terbukti sanggup mempengaruhi masyarakat (khalayak) tentang “*what to think about*” melalui pemilih berita tertentu dengan mengabaikan yang lainnya, dengan menonjolkan satu persoalan dan mengesampingkan yang lain, media membentuk citra atau gambaran dunia kita seperti yang disajikan dalam media massa (Rakhmat, 1994 : 225). Stereotipe menurut Emil Dofivat, “adalah gambaran umum tentang individu. Kelompok profesi atau masyarakat yang tidak berubah-ubah bersifat klise, dan seringkali timpang dan tidak benar (dalam Rakhmat, 1994 :225)”. Hal senada diungkapkan oleh Deddy Mulyana, stereotipe adalah “menggeneralisasikan orang-orang berdasarkan informasi dan membentuk asumsi mengenai mereka berdasarkan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok (2000 : 215).

Besarnya pengaruh media massa dalam membentuk stereotip ini dijelaskan oleh penelitian yang diadakan pada tahun 1977 oleh *United State Commision of Civil Right*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam media massa Amerika, kelompok minoritas sering ditampilkan dalam stereotip yang memudahkan : “Orang negro bodoh, malas, dan curang, orang Indian liar dan ganas, orang Asia umumnya pekerja kasar seperti pelayan, tukang cuci dan tukang masak, orang kulit putih sering muncul sebagai punya lakon” (dalam

Rakhmat, 1994 : 225). Saat ini, muncul fenomena stereotip yang merendahkan masih mendominasi tayangan media massa yang berasal dari Amerika, terutama dalam bentuk film. Dalam film-film kerap ditunjukkan superioritas orang kulit putih dan inferioritas ras lainnya, baik kulit hitam maupun orang Asia.

2.2 *Agenda setting* dan proses *Labelling*

Ketika media massa memilih untuk menayangkan suatu peristiwa dan tidak menayangkan yang lainnya, media massa sudah masuk pada proses *agenda setting*, ketika media massa menayangkan suatu peristiwa dengan durasi tertentu intensitas tertentu, ini juga menunjukkan proses *agenda setting*. Dalam posisi inilah media massa punya kuasa, menentukan apa yang penting dan apa yang tidak penting untuk diagendakan bagi khalayak seperti halnya kekuasaan dalam hal lainnya, kekuasaan media massa pun dapat menimbulkan bias. Mengapa? karena para penulis berita adalah manusia dengan segala unsur subjektifitasnya. Kekuasaan dan kemampuan media massa dalam menentukan apa yang dianggap penting atau apa yang harus dipikirkan oleh khalayak erat kaitannya dengan proses *labelling*. Teori *labelling* sendiri menurut Deddy Mulyana, ”diinspirasi oleh teori interaksi simbolik oleh George Herbert Mead dalam bukunya ‘*Mind, self and Society*’ (2002 : 69). Secara umum, ada beberapa asumsi dasar pada teori ini:

- (1) Penyimpangan bukan seperangkat ciri individu atau kelompok melainkan suatu proses interaksi antara para penyimpang dan bukan penyimpang. Mereka yang mewakili kekuasaan atau yang mampu memaksakan suatu definisi moralitas konvensional terhadap orang-orang lain seperti pemerintah daerah militer, politisi, ilmuwan sosial, dan wartawan (media massa), menjadi sumber utama *labelling*.
- (2) Label diciptakan untuk mengkategorisasikan orang serta tipe-tipe penyimpangan spesifik mereka, sehingga mencerminkan struktur kekuasaan masyarakat (Deddy Mulyana, 2002 : 69 – 70).
- (3) Proses penjulukan dapat sedemikian hebat hingga korban-korban misinterpretasi ini tidak dapat menahan pengaruhnya. Karena berondongan julukan yang bertentangan dengan pandangan mereka sendiri, citra-diri asli mereka sirna, diganti dengan citra-diri baru yang diberikan orang lain. Dampak julukan itu jauh lebih hebat dan tidak

berhubungan dengan kebenaran penjulukan tersebut, terutama bagi orang dalam posisi lemah, rakyat jelata misalnya (Deddy Mulyana, 2001 : 70).

3 Pembahasan

3.1 *Agenda Setting* pada pemberitaan Tragedi Bali

Bagaimanapun, realitas yang “diciptakan” oleh media massa merupakan suatu bentuk *regimentasi* tersendiri, “suatu realitas dicitrakan dan diperbesar secara terus-menerus dengan cara yang sama sehingga orang tidak bisa melakukan *distingsi*” (Wicaksono, 1995 : 6). Pada saat ini terjadi media massa sudah masuk ke dalam apa yang ditanamkan “kekerasan diskursif”, dimana media massa mempunyai otonomi penuh untuk melakukan agenda atas dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan aspek kepentingan khalayak, kecuali tentunya hanya memikirkan aspek bisnis (profit orientation). Khalayak tentunya hanya didesak untuk dikendalikan (diagendakan) suka atau tidak suka.

Repotnya, pada era globalisasi ini proses *regimentasi* inipun berlangsung secara global, dilakukan oleh media massa internasional. Globalisasi yang dirumuskan McLuhan sebagai, “Globalisasi Village” (1995 : 39) menyebabkan terjadinya peleburan informasi keseluruhan dunia tanpa batas dalam hitungan per detik. Robertson sebagaimana dikutip Taufiqur Tahman menggambarkan globalisasi sebagai “pemampatan dunia (*compression of the world*)” (dalam Republika, 29 Oktober 2002 : 5). Konsekuensinya, suatu peristiwa dari belahan bumi manapun akan segera tersebar ke seluruh penjuru dunia, bahkan tanpa ada jeda waktu.

Berkenaan dengan tragedi pemboman di Bali tanggal 12 Oktober 2002 lalu, beritanya langsung menjadi agenda dunia, seluruh “global village” itu tertuju perhatiannya kepada Indonesia. Dalam beberapa hari, semua “mata” terarah ke Indonesia, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan sebagai berikut:

- (1) Korban pada kejadian ini sebagian besar warga negara asing (Warga Australia).
- (2) Bali merupakan tujuan utama wisata Indonesia dan terkenal karena keamanannya.
- (3) Indonesia sejak tragedi WTC memang sedang “disorot” oleh dunia internasional dengan tuduhan “sarang” teroris.

Serta banyak lagi alasan, mengapa tragedi Bali telah menjadi agenda global selama dua bulan terakhir. Media massa, baik nasional maupun internasional adalah faktor penentu mencuatnya agenda ini untuk terus diangkat kepermukaan. Bahkan skenario *regimentasi* pemberitaan peledakan di Bali diduga telah dirancang sedemikian rupa, sebagaimana diungkapkan Hadimulyo, aktivis *Center for people's participation* yang menegaskan bahwa, “..... inilah yang digarap serius para pelobi dan “perancang media” (dalam *Republika*, 11 November 2002 : 1). Yaitu, upaya serius membentuk agenda media massa terarah sepenuhnya kepada pemberitaan seputar peledakan di Bali.

Sebenarnya, agenda utama apa yang disiapkan media massa internasional atas pemberitaan tragedi Bali? Terdapat berbagai kemungkinan, namun tiga hal berikut ini begitu transparan tampak pada pemberitaan media massa nasional, terlebih media massa internasional dalam memfokuskan pemberitaan tragedi Bali, yaitu :

1. *Blow-up* jumlah korban ledakan, kondisi mengerikan pada korban peledakan.
2. *Blow-up* proses penangkapan Abu Bakar Ba'asyir di Solo sampai penahanannya di Jakarta.
3. *Blow-up* (memfokuskan bahkan cenderung melebih-lebihkan) proses penangkapan beberapa “tersangka” peledakan yang mengaku punya relasi, dengan Ba'asyir. *Blow-up*, latar belakang kehidupan pesantren sebagai basis tempat semua radikalisme pemboman di Bali disiapkan.

Bahkan, begitu kuat dan intensifnya *agenda setting* media massa atas berita peledakan di Bali dengan segala aksesnya, telah “menggiring” khalayak ke arah pesimisme. Menurut Susanto, pada salah satu tulisannya di *Harian Umum Kompas*, pemberitaan media massa di Indonesia nyaris semuanya bernada negatif. Menurutnyanya :

Jika dicermati, proporsi “opini” lebih besar dari fakta terhadap peristiwa itu sehingga opini yang dibentuk di masyarakat akan dikemukakan oleh opini-opini yang dijadikan berita oleh media massa. Sayang opini yang termuat di media massa hampir semuanya bernada negatif dan kian menjerumuskan masyarakat kepada jurang pesimisme yang membentuk persepsi terhadap krisis Bali dan persepsi adalah “realitas” bagi bersangkutan (Susanto, 12 November 2002:30)

Kekhawatiran Susanto ini tentu bukan tanpa alasan. Ketika tragedi Bali terus-terusan menjadi topik utama pembicaraan di media massa, selama itu pula masyarakat terpusat perhatiannya bahkan pikirannya (dalam konteks *agenda setting*) kepada masalah ini. Di kantor-kantor, di pasar-pasar, di rumah-rumah, di jalanan, semua orang membahas peledakan di Bali. Padahal, dalam konteks Jurnalistik, ada masalah-masalah lain yang memiliki aspek kedekatan (*proximity*) baik secara geografis maupun psikologis, politis, ekonomis yang lebih penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, yaitu masalah ekonomi dan politik yang berkepanjangan tanpa titik terang pemecahannya. Harus diakui, media massa nasional maupun global telah sukses menggunakan momentum peledakan di Bali untuk membangun agenda settingnya untuk membentuk citra Indonesia dan kelompok Islam sebagai agenda utama politik Internasional. *Agenda setting* media massa secara global melalui proses regimentasinya telah mengalihkan agenda-agenda lain yang semula menjadi fokus perhatian. Agenda global yang luput, bahkan terabaikan pemberitaannya adalah rencana serangan Amerika Serikat ke Irak, serangan Amerika ke Afganistan yang masih menimbulkan “kesengsaraan” bagi bagian besar rakyat Afganistan, konflik di Palestina yang telah menelan korban ribuan orang.

3.2 Kontribusi Media Massa dalam Proses *Labelling* Teroris.

Menurut Amin Rais pernah suatu ketika,

“sejumlah pendeta kristen Amerika Serikat menyesalkan kecenderungan media massa Amerika untuk menghubungkan terorisme yang terjadi di Timur Tengah, atau yang berasal dari Timur Tengah, dengan ajaran Islam. Para pendeta itu tahu bahwa tidak ada secuil pun ajaran Islam yang membenarkan teror, sehingga mereka menganggap media massa Amerika sebagai sangat tendensius dan telah terperangkap ke dalam kepentingan politik tertentu. Para pendeta kristen itu tanpaknya punya tanggung jawab moral untuk meluruskan persepsi keliru media massa Amerika tentang Islam “ (1999 : 131).

Kutipan ini jelas menunjukkan bahwa betapa kuatnya media massa melalui agendanya dalam membangun label teroris terhadap Umat Islam. Pada konteks tertentu, media massa Baratpun senantiasa menghubungkan radikalisme dengan Islam.

Keprihatinan atas sikap semena-mena media massa Barat pun

diungkapkan oleh Jalaluddin Rakhmat:

Media massa internasional melestarikan kamus khusus yang dibuat oleh negara-negara adikuasa. Siapa yang termasuk teroris? Yakni, yang membunuh cicilan tadi, membunuh karena tertekan, atau kelompok kecil yang melakukan, perlawanan terhadap kekuatan besar. Media massa akan membenarkan tindakan pembunuhan massal dan menyebutnya bukan teroris. Yang harus dilakukan oleh media massa Islam adalah membongkar mitos-mitos yang ada. Lebih baik teroris dikenakan kepada Amerika atau Israel (1998 : 36)

Pendapat pakar komunikasi Jalaluddin Rakhmat itu semakin menegaskan bahwa sejak lama secara sistematis media massa internasional telah melakukan proses *labelling* teroris terhadap Umat Islam. Sehingga tidak mengherankan kasus pesawat bunuh diri yang menghancurkan gedung WTC, pelakunya dituduhkan kepada orang Islam meski sampai saat ini belum terbukti kebenarannya. Karena alasan ini juga, Amerika Serikat secara emosional melakukan penyerangan terhadap Afganistan yang dicurigai sebagai basis Al Qaeda. bahkan dari massa ke massa semua kejadian yang berbau “terorisme selalu ditudingkan kepada pihak Islam sebagai pelakunya. Padahal, bom bunuh diri pun pernah dilakukan oleh warga Amerika sendiri. Proses labelling ini selalu dikaitkan dengan peran media massa yang begitu dominan dalam proses sosialisasi label “teroris” tersebut. Hal ini tidak mengherankan sebab proses *labelling* “diintensifkan oleh media massa, khususnya televisi, efek labelling ini akan jauh lebih besar pada diri khalayak dan meninggalkan korban sendirian”. (Deddy Mulyana 2002 : 72)

Di Indonesia sendiri, proses labelling (penjulukan) ini sudah berlangsung lama. Bahkan, sudah sering terjadi label itu terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari seolah-olah hal biasa, bukan sebuah stigma lagi. Misalnya, orang Aceh terbiasa digambarkan oleh media massa sebagai “separatis”, teroris, “musuh pemerintah”, dan “Gerakan Pengacau Keamanan (GPK)”. Menurut Deddy Mulyana, Label ini berkembang karena proses pengadopsian perspektif pemerintah (pihak yang kuat), kemudian secara intensif disosialisasikan melalui agenda media massa terus-menerus. Padahal, dalam perspektif orang Aceh, mereka bukan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), mereka adalah kelompok orang yang menginginkan tegaknya syariat Islam secara menyeluruh di wilayah Aceh. Selain itu, beberapa label yang cukup familiar dikenal masyarakat kita adalah komunis (PK), subversif, provokator, julukan-julukan itu berkonotasi negatif dan harus dihindari oleh siapapun bila masih ingin punya kehidupan sosial.

Media Massa Dan Labelling Terorisme (Suatu Analisis Terhadap Skenario Agenda Setting Global Dan Nasional) (Ema Khotimah)

Berbagai label telah diciptakan terhadap kelompok tertentu oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan baik itu politisi, pejabat pemerintah atau militer. Bila diintensifkan sosialisasinya oleh media massa melalui proses *agenda setting* yang bersifat regimentatif, maka efeknya pun akan semakin kuat. Padahal dalam proses labelling ini, korban pada umumnya tidak dapat melakukan perlawanan dan menolak labelling. Terlebih, bila pencitraan itu juga diagendakan secara terus-menerus oleh media massa, khalayak pada kondisi ini seakan setiap saat terafirmasi bahwa label itu patut ditujukan pada sekelompok orang tertentu dan benar adanya tanpa proses seleksi pemikiran lagi.

Bila ada reaksi dari para korban terhadap julukan tersebut, terbukti bukan mengurangi *efek labelling*, malang semakin memperteguh cap yang ditujukan kepada mereka. Pada posisi inilah korban labelling menanggung beban yang sangat berat baik secara sosial, psikologis, bisa jadi juga secara ekonomis. Mengapa? Karena definisi kejahatan, “ditentukan oleh pihak yang kuat melalui perumusan hukum serta interpretasinya oleh polisi, pengadilan, dan institusi-institusi lain.” (Giddens dalam Mulyana, 2002 : 70). Hal ini juga yang terjadi pada beberapa tokoh Islam, khususnya Ba’asyir yang memang sebelumnya sudah terlanjur memperoleh label teroris, bahkan dalang teroris oleh dunia internasional. Pada kasus pemboman di Bali, julukan itu semakin dikukuhkan dengan ditangkapnya Ba’asyir sebagai tersangka pelaku pemboman. Didukung oleh komponen-komponen yang kompeten untuk membentuk labelling, yaitu polisi, institusi peradilan, militer dan media massa di dalam negeri pun terlibat dalam usaha sistematis mengagendakan label teroris kepada kubu Ba’asyir dan pihak Islam.

3.3 Dampak Labelling dan Stigma Teroris Terhadap Kehidupan Sosial

Penangkapan atas diri Ba’asyir yang dituduh sebagai dalang terorisme, utamanya sebagai dalang pemboman di Bali telah mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan, tak kurang para ilmuwan, politisi, dan tokoh-tokoh Islam mengecam sikap pemerintah atas penangkapan Ba’asyir yang sangat “kental” bermuatan politis. Menurut Djoko Susila, komisi I DPR dari Fraksi Reformasi, dalam proses penangkapan itu ada semacam *Islamophobia* dari tubuh aparat penegak hukum (dalam Repubblica, 29 Oktober 2002 : 1). Terlebih semua tersangka kebetulan beragama Islam lengkaplah sudah cap Islam dan terorisme menjadi satu paket tak terpisahkan. Meski banyak kalangan menyadari sepenuhnya bahwa proses label teroris yang ditujukan kepada Umat Islam ini sebagai usaha stigmatisasi yang sistematis. Sampai

saat ini belum ada upaya yang serius untuk “menghalau” sedikit demi sedikit stigma (cacat) tersebut. Bahkan, melalui tersangka Imam Samudra yang di *blow-up* terus-menerus dengan ungkapan-ungkapan yang ekstrim, semakin memperkokoh stereotip orang Islam adalah teroris.

Islamophobia ini, bukan hanya menimpa aparat penegak hukum di Indonesia. Bahkan, Australia yang notabene mengalami kerugian terbesar pada peledakan di Bali karena menelan korban terbanyak warga negaranya, telah melakukan aksi pengeledahan terhadap rumah warga negara (WNI) Muslim di Australia. Aksi serupa sebenarnya pernah terjadi pasca tragedi WTC “September 2001 di beberapa wilayah di Australia. Orang Islam dijadikan sasaran kemarahan, tidak hanya itu, beberapa mesdjid bahkan dirusak oleh orang Australia. Di Amerika sendiri, situasinya lebih “gawat” lagi, orang-orang Islam diawasi secara ketat, bahkan ada yang dianiaya pasca tragedi WTC tersebut. Hal ini terjadi sehubungan dengan tudingan Amerika bahwa pelaku pesawat bunuh diri itu adalah orang Islam.

Di dalam negeri sendiri, usaha stigmatisasi ini dapat diterjemahkan dalam konteks politik. Oleh beberapa kalangan, penangkapan terhadap tokoh Islam Ba’asyir ini, dipandang sebagai usaha penggembosan partai politik Islam pada Pemilu yang akan lama lagi berlangsung. Pada tahun 1980, suasana seperti inipun terjadi, para tokoh Islam banyak ditangkapi. Tujuannya adalah untuk menimbulkan *deterrent effect* (meminjam istilah Hadimulyo), agar tidak mendukung parpol Islam dalam Pemilu mendatang.

Bagaimana dengan agenda media massa kita beberapa bulan mendatang? Akankah tetap, “berbaris rapi di belakang media Barat menjajakan pandangan dunia mereka. Apa yang dipandang penting oleh Barat dipandang penting juga oleh kita”. (Rakhmat, 1998 : 9). Kemudian akankah media massa kita terus hanyut dalam semua *agenda setting* media massa internasional? Tentu perlu pembahasan lain untuk memprediksi arah *agenda setting* media massa Indonesia pasca penyidikan terhadap tersangka pelaku peledakan di Bali.

4 Penutup

Pemberitaan media massa yang telah begitu besar memberikan kontribusi pada proses labelling teroris, telah terjebak pada kondisi pembolak-balikan fungsi media massa dari fungsional menjadi disfungsional atau bahkan sebaliknya dari sifatnya yang disfungsional untuk hal tertentu

menjadi fungsional. Karena, realitas yang ditampilkan media massa mengalami distorsi. Begitu juga dalam pemberitaan tragedi di Bali, media massa internasional dan nasional begitu intensif “menyuguhkan” agenda labelling teroris pada kelompok Islam, Debat pada media massa tak teralihkan bahwa satu-satunya dalang terorisme ini adalah kelompok Islam.

Sebagaimana dikemukakan Prof. Johan Galtung saat wawancara dengan Harian Umum Kompas, bahwa tugas media massa ialah meluruskan ketimpangan-ketimpangan perspektif yang berkembang. Prof. Galtung berujar, “merupakan tanggung jawab media untuk mengalihkan debat tentang siapa dalangnya ke arah apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan”. (Dalam Kompas, 17 November 2002 : 4). Media massa pada kondisi saat ini sangat dituntut melaksanakan salah satu fungsi idealnya yaitu sebagai saluran advokatif bagi pandangan-pandangan politik yang berbeda-beda. Media massa nasional perlu membangun perspektif yang lebih objektif terhadap keseluruhan pemberitaan tragedi Bali. Tugas media massa juga untuk menyampaikan aspek-aspek positif dari krisis yang ditimbulkan oleh tragedi Bali. Citra sebagai “negara teroris” dan bukan sebagai “negara korban teroris” sangat merugikan. Media massa perlu membangun agenda agar masyarakat dan pemerintah selalu berorientasi pada “solve the problem”.

DAFTAR PUSTAKA

- Galtung, Johan, 2002, “*Lebih Jauh Dengan Prof. Johan Galtung* Kompas, 17 November : 4
- Hadimulyo, 2002, “*dalam Fokus : Jangan Hanyut Dalam Agenda Barat*”, Republik 1 November : 1.
- Hamijoyo, Santoso S, 1980, “*Lima Jurus Strategi Dasar Pendidikan dalam Era Globalisasi*” Mimbar Pendidikan Jurnal Pendidikan No. 4 Thn. IX, Desember.
- Hermawan, Denny, 2002, “*dalam Fokus : Jangan Hanyut dalam Agenda Barat*”, Republika 11 November : 1.
- Husaini, Ardian, 2002, “*Antara Ba’asyir dan Sharon*”, Republika 2 Oktober : 5.

- McLuhan, Marshall, 1995, *"The Global Village"*, University of Toronto Press.
- Muchson, 2002, dalam Fokus : *"Kita Dizalimi Bangsa Sendiri"*, Republika 29 Oktober : 1
- McQuail Denis and Windahl, 1984, *"Communication models : for the Study of Mass Communication"*, New York, Longma Inc.
- Mulyana, Deddy, 200, *"Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar"*, Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, Deddy, 2001, *"Nuansa-nuansa Komunikasi Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer"*, Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, Deddy, 2002, *"Intergroup labelling di Indonesia : Kontribusi Media Massa terhadap Crisis Communication : Media-Militer-Politik"*, Yogyakarta : Galang Press.
- Rahman, Taufiqur, 2002, *"Meredam Terorisme dengan Sensitivitas Budaya"* : Republika 29 Oktober : 5.
- Rais Amin, 1999, *"Cakrawala Islam : Antara Cita dan Fakta"*, Bandung : Mizan.
- Rakhmat, Jalaluddin, 1998, *"Catatan Kang Jalal : Visi Media, Politik, dan Pendidikan"*, Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Rakhmat, Jalaluddin, 1994, *"Psikologi Komunikasi"*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Susanto, AB, 2002, *"Manajemen Krisis Pasca Tragedi Bali"*, Kompas, 12 November : 30.
- Susilo, Djoko, 2002, *"dalam Fokus : Kita Dizalimi Bangsa Sendiri"*, Republika, 29 Oktober : 1.
- Wicaksono, Adi, 1995, *"Kreativitas Kultural dan Regimentasi Linguistik"*, Republika, 17 Februari : 2-6.